

KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

27 November 2023

DPRD Kota Mataram Kelebihan Bayar Transport Rp 218,5 Juta

Miq Ade - Senin, 27 November 2023 | 20:00 WIB



Lalu Aria Dharma (Zad/Lombok Post)

LombokPost-Badan Pemeriksa Keuangan (**BPK**) menemukan kelebihan pembayaran tunjangan transportasi di **DPRD Kota Mataram** senilai Rp 218,5 juta pada tahun anggaran 2022. **BPK** meminta kelebihan pembayaran itu dikembalikan karena berpotensi merugikan negara.

Sekretaris DPRD Kota Mataram Lalu Aria Dharma mengatakan, kelebihan bayar itu telah secara berkala sudah dikembalikan. "Karena itu sifatnya **temuan**, maka kita harus kembalikan," katanya, Minggu (26/11).

Pengembalian itu atas nama dua orang anggota **dewan** yang diberikan fasilitas tunjangan transportasi. "Jadi sifatnya (pengembalian, Red) pribadi," paparnya.

Aria Dharma mengatakan, anggota **dewan** yang dimaksud sudah mulai mengembalikan kelebihan pembayaran. Hanya saja berapa jumlah yang dikembalikan belum diketahui secara rinci. "Kalau persentase pengembaliannya saya tidak tahu persis yang jelas ada progres," terangnya.

Sekadar gambaran, setiap anggota **dewan** di DPRD Kota Mataram mendapat fasilitas tunjangan transportasi senilai Rp 11,5 juta setiap bulan. Maka dalam setahun, setiap satu orang anggota **dewan** mengantongi Rp 138 juta tunjangan transportasi.

Tunjangan ini hanya diberikan pada anggota **dewan** yang tidak memiliki fasilitas kendaraan dinas. Sedangkan yang diberikan fasilitas kendaraan dinas tidak berhak menerima tunjangan tersebut. Pemberian kendaraan dinas diatur hanya untuk pimpinan DPRD, karena keterbatasan anggaran pemerintah membelikan semua anggota **dewan** fasilitas kendaraan dinas.

Aria Dharma mengatakan, pengembalian kelebihan bayar diberikan tenggat waktu sampai jelang berakhirnya masa jabatan anggota **dewan**. "Tenggat waktu yang diberikan BPK sampai Juni 2024," jelasnya.

Pihak kesekretariatan, kata Aria Dharma, berupaya segera menghimpun kelebihan pembayaran pada dua anggota **dewan** dimaksud. "Yang penting target kami adalah sebelum usai masa jabatan, (kelebihan bayar) harus sudah selesai (dilunasi)," tekannya.

Anggota **dewan** yang dimaksud juga telah menerima keputusan **BPK**. "Sudah ada hitam di atas putih, kalau itu tidak ada masalah. Sudah tidak ada perdebatan (itu masuk dalam **temuan**)," paparnya.

Inspektur **Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati** juga menyampaikan hal yang senada. Sejumlah anggota **dewan** yang disebut menerima kelebihan bayar telah mulai mengembalikan kelebihan pembayaran.

Anggota **dewan** yang dimaksud, bahkan telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (**SKTJM**). Di dalamnya juga diatur mengenai komitmen nilai yang harus disetorkan dalam setiap bulan.

"Iya ada (dijelaskan angka yang harus disetor setiap bulan)," ujarnya.

SKTJM itu menjadi dasar bendahara daerah memantau kepatuhan pengembalian. "Sebagai dasar untuk selalu mengingatkan," ujarnya.

Nelly berkeyakinan, nilai **temuan** itu akan bisa dilunasi sampai batas akhir yang diberikan **BPK**. "Apalagi *kan* sudah ada pertemuan dengan **KPK** beberapa waktu lalu mengenai tindak lanjut **temuan-temuan**," ujarnya. (**zad**)